

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Peran perempuan dalam partai politik di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara sudah melaksanakan perannya dengan baik dimana dilihat dari tabel jawaban responden secara keseluruhan pada bab sebelumnya yang menjawab soal, dengan jawaban A (Iya) sebanyak (53%) maka dari itu dapat di tarik kesimpulan peran perempuan dalam partai politik (Studi Kasus Di DPW PKS Provinsi Sumatera Utara) sudah melaksanakan perannya sebagai anggota partai politik dengan baik. Kemudian yang menjawab soal, dengan jawaban B (Kadang-Kadang) sebanyak (30,8%), dan yang menjawab soal, dengan jawaban C (Tidak) sebanyak (16,2%).
2. Kedudukan perempuan yang layak dalam partai politik PKS sudah di berikan sesuai dengan jawaban responden mengenai kedudukan kaum perempuan dalam partai politik, dimana hasilnya lebih dari 76% mengatakan iya/pernah diberikan kedudukan yang layak dalam partai politik DPW PKS Provinsi Sumatera Utara.
3. Keterwakilan perempuan dalam partai politik sudah diberikan keterwakilannya jika dilihat dari hasil jawaban responden yang dilakukan penulis di lapangan antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki dalam

partai politik DPW PKS Provinsi Sumatera Utara dimana dalam tabel 4-21 jawaban responden secara keseluruhan di nomor 6-10, pada item soal 7 dan 10 menyatakan dibawah dari 50% yaitu untuk item soal nomor 7 sebanyak 26,7% dan item soal nomor 10 sebanyak 36,7% dan jawaban responden pada item soal nomor 6,8, dan 9 lebih dari 50% , maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya ketewakilan perempuan sudah diberikan/sama dengan kaum laki-laki didalam partai politik PKS Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini peran perempuan dalam partai politik DPW PKS Provinsi Sumatera Utara terbukti bahwa kaum perempuan memiliki peran yang telah ditentukan secara ADRT (anggaran dasar rumah tangga) oleh partai politik PKS misalnya melalui RKI (rumah keluarga Indonesia), dengan adanya program perempuan yang mana didalamnya melibatkan masyarakat seperti hari kartini dan hari ibu.

4. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana dalam penelitian Yuswaniati Ramadhani 2005 yaitu tentang “Pengaruh kebijakan partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di pemerintahan (Studi Kasus pada DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara) yang mana di dalam pembahasan penelitian sebelumnya adalah membahas partai politik memiliki peranan yang sangat besar dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di pemerintahan khususnya di DPRD Provinsi Sumatera Utara, karena keberhasilan perempuan menduduki jabatan

diparlemen selain ditentukan oleh kapasitasnya juga di tentukan dari basis mana mereka berasal.

5. Hal ini tidak terlepas dari adanya kebijakan atau Undang-Undang yang ada di partai politik tersebut maupun yang dikeluarkan pemerintah. Sementara itu penelitian penulis mengenai “Peran perempuan dalam partai politik (Studi Kasus di DPW PKS Provinsi Sumatera Utara).

## **B. Saran**

Diharapkan kepada anggota DPW PKS Provinsi Sumatera Utara khususnya yang kaum perempuan lebih kerja keras lagi dalam memberikan perannya demi kepentingan partai politik baik itu untuk agama, masyarakat, nusa dan bangsa.

Diharapkan kepada anggota DPW PKS Provinsi Sumatera Utara khususnya yang kaum perempuan lebih ikut serta dalam memberikan usulan dalam pembuatan kebijakan publik kepada pemerintah yudikatif (lembaga peradilan), pembuatan kebijakan publik kepada pemerintah pusat.

Diharapkan kepada anggota DPW PKS Provinsi Sumatera Utara khususnya yang kaum perempuan dapat memberikan/pembuatan maupun Pengambilan kebijakan publik, menjadi Perwakilan dalam partai politik, Kedudukan dalam partai politik, Pembuatan jaringan aktivis perempuan di pemerintah daerah baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif begitu pula dalam pemerintah pusatnya baik dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Diharapkan kepada anggota DPW PKS Provinsi Sumatera Utara khususnya yang kaum perempuan agar lebih aktif dalam menjalankan peran dan fungsinya selaku pengurus partai baik itu kepada pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat. Dalam pembuatan kegiatan-kegiatan bakti sosial, atau melaksanakan pelatihan yang dilakukan untuk kaum perempuan khususnya, dan seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara umumnya.

